

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi antara variabel demografi dan variabel pembangunan. Perubahan yang terjadi dalam jumlah, komposisi dan pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada berbagai aspek pembangunan selanjutnya akan mempengaruhi dinamika kependudukan (Ananta, Wangkaren, dan Cicih : 1995). Indonesia sebagai salah satu dari negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang terbesar . Kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk menjadi variabel utama dalam kajian kependudukan di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia tiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan dan memerlukan kebijakan kependudukan yang efektif untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 1971-2005

Tahun	Jumlah Penduduk
1971	119.208.229
1980	147.208.228
1990	179.378.946
1995	194.754.808
2000	205.132.458
2005	218.868.791

Sumber :SP 1971-2000,Supas 1995-2005

Berdasarkan tabel data diatas jumlah penduduk Indonesia meningkat dua kali lipat dalam 30 tahun terakhir. Menurut Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief pada tahun 2050 penduduk dunia akan mencapai 9,2 miliar dan penduduk Indonesia 280 juta. Itu akan terjadi bila angka *total fertility rate* (TFR) masih berada di kisaran 2,5 sampai 2,6. Tapi, bila target penurunan TFR secara nasional tercapai, TFR diturunkan menjadi 2,1 - 2,0 pada 2015, maka jumlah penduduk Indonesia pada 2050 dapat turun menjadi 245 juta. Program pengendalian penduduk sangat diperlukan oleh Indonesia untuk mencegah ledakan penduduk, salah satunya

adalah dengan melaksanakan program Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana diharapkan dapat menekan angka kelahiran sehingga jumlah penduduk Indonesia dapat dikendalikan guna mencegah ledakan penduduk yang dapat menimbulkan masalah-masalah sosial bagi masyarakat.

Masalah-masalah sosial yang mungkin muncul adalah masalah kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang dan papan. Masalah ini sudah dianalisis oleh seorang ekonom pada abad ke-16, yakni Thomas Robert Malthus yang memiliki gagasan mendasar tentang pertumbuhan penduduk (Matras ; 1973, hal 13) , yakni :

1. *Pertumbuhan penduduk yang meningkat bila dibandingkan dengan sumber makanan yang tersedia maka akan selalu terdapat tekanan pada penduduk dan keberlangsungannya*
2. *Tekanan-tekanan ini akan menentukan “positive check” dari angka mortalitas, dan dapat meningkatkan angka kemiskinan, kejahatan, penyakit, yang dapat mengurangi angka mortalitas dan menghambat pertumbuhan penduduk.*
3. *Keseimbangan pertumbuhan penduduk dapat dicapai melalui “preventive check” dari faktor moral, yakni menunda perkawinan atau pun hidup melanjung*

Malthus juga menyimpulkan bahwa kekuatan populasi yang superior tidak bisa diimbangi tanpa menghasilkan penderitaan atau kejahatan (Skousen : 2005, hal 83). Walaupun demikian terdapat juga beberapa ahli ekonomi yang menentang pendapat Malthus tersebut mereka menunjukkan bahwa dengan kemampuannya dan kecerdasannya manusia dapat memikirkan cara mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut dan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan sumber daya yang unik untuk industri ekonomi modern (Hull:2006, hal 19).

Indonesia adalah negara berkembang dengan kuantitas sumber daya manusia sangat memadai dalam kegiatan pembangunan, namun hal tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut data laporan pembangunan manusia terbaru yang dikeluarkan UNDP menunjukkan *Human Development Index* (HDI) atau indeks pembangunan manusia Indonesia tidak banyak berubah. Pada tahun 2007, Indonesia hanya berada di ranking 108 dari 177 negara. Indonesia masih tertinggal ketimbang negara Asia Tenggara lainnya. HDI Malaysia menempati posisi 61, Thailand 74, dan Filipina 84. Dari penilaian UNDP tersebut menunjukkan kualitas manusia Indonesia masih rendah. Pada tahun 2008 peringkat Indonesia menjadi 107, naik satu

peringkat (UNDP 2008). Dengan menggunakan indikator dari HDI memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan). Indikator tersebut menunjukkan bahwa kualitas manusia Indonesia masih rendah dengan menggunakan ketiga indikator utama HDI. Pengukuran dalam HDI tersebut melupakan satu indikator penting dalam menentukan kualitas hidup manusia Indonesia, yakni rasa aman. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) yang digunakan oleh BPS juga mengabaikan tingkat rasa aman. Dalam pendekatan *cost of basic needs*, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar pangan (senilai 2100 kalori, kebutuhan energi tiap hari) maupun kebutuhan dasar bukan pangan (Triana:2006). Rasa aman tidak diperhitungkan sebagai faktor utama dalam menciptakan kondisi kesejahteraan individu dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Rasa aman menurut Abraham Maslow merupakan faktor penting dalam memenuhi kebutuhan aktualisasi diri manusia (Maslow : 1987) . Dengan rasa aman manusia dapat melakukan aktivitasnya dengan maksimal guna mencapai tujuan hidup.

Salah satu masalah yang muncul dari laju pertumbuhan penduduk, adalah peningkatan angka partisipasi angkatan kerja yang tidak diikuti dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga memunculkan masalah pengangguran.

Angka pengangguran terbuka pada tahun 2007 diperkirakan mencapai 12,7 juta jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 45,7 juta jiwa.. Menurut Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil dan Menengah, Bambang Widianto, Pada tahun 1997 tingkat pengangguran terbuka mencapai sekitar 4,7 persen, tahun 2000 mencapai sekitar 6,12 persen, tahun 2001 sekitar 8,1 persen, 2004 mencapai sekitar 9,86 persen, dan 2005 mencapai sekitar 10,9 persen. Bahwa angka pengangguran yang sejak tahun 1997 menunjukkan kecenderungan meningkat, pada tahun 2006 ini menunjukkan adanya penurunan yaitu menjadi 10,4 persen (per Februari 2006). Menurut

Bambang, sektor jasa, industri, manufaktur, dan lain-lain diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tahun 2007 sehingga angka pengangguran berkurang menjadi 9,9 persen.

Angka pengangguran yang meningkat merupakan salah satu dari indikator kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia salah satu indikasinya adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang dan papan. Tentunya akan diikuti oleh variabel lainnya yakni pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, rekreasi yang tidak dapat terpenuhi dengan baik, menyebabkan jumlah masyarakat miskin meningkat dan sulit untuk keluar dari kemiskinan yang membelenggu masyarakat. Menurut Tri Sambodo, Pusat Penelitian Ekonomi LIPI menunjukkan bahwa semakin besar angka pengangguran terbuka merupakan indikator meningkatnya angka kemiskinan. Proporsi penduduk miskin yang berada dalam garis kemiskinan mengalami penurunan dari 15,1 persen pada tahun 1990 menjadi 11,3 persen pada tahun 1996. Pada tahun 1998, pemerintah Indonesia mengadopsi standar hidup yang baru, akibatnya angka kemiskinan meningkat sebesar 23,4 persen pada tahun 1999 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2002 sebesar 18,2 persen dan 17,4 persen pada tahun 2003 (Widjojo & Simatupang:2004, hal 26).

Tabel.2. Kondisi Jumlah Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2000-2007

Tahun	Jumlah Pengangguran
2000	5.826.938
2001	8.005.031
2002	9.132.104
2003	9.531.090
2004	10.251.351
2005	11.899.266
2006	11.104.693
2007	10.550.000

Sumber : Depnakertrans, 2007

Dari tabel tersebut terlihat terjadi peningkatan jumlah pengangguran terbuka dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2007. Peningkatan angka pengangguran salah satunya adalah peningkatan jumlah penduduk, khususnya peningkatan jumlah angkatan kerja namun tidak disertai dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup. Akibatnya angka pengangguran akan semakin meningkat dan dapat memunculkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain masalah kemiskinan dan kejahatan.

Kondisi kemiskinan dapat diduga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kejahatan. Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS Tahun 1996 mengungkapkan banyaknya korban kejahatan tercatat 1.097 orang tiap 100.000 ribu penduduk. Dari jumlah korban ini tercatat : 0,1 persen meninggal; 0,7 persen cacat; 1,7 persen luka-luka; 1,6 persen korban perkosaan; 7 persen gangguan jiwa. Berdasarkan urutan kejahatan yang paling tinggi frekuensinya: pencurian, penganiayaan, perkosaan dan pembunuhan. Dari data Susenas 1996 tersebut menunjukkan bahwa kejahatan juga menyumbang terhadap angka mortalitas penduduk. Variabel kependudukan khususnya mortalitas memiliki keterkaitan dengan variabel korban kejahatan. Pada statistik kriminal kepolisian dapat terlihat karakteristik jenis , pelaku dan korban kejahatan. Dari data tersebut dapat terlihat pola dari karakteristik sosiodemografis antara pelaku dan korban kejahatan.

Tabel 3. Data Statistik Kriminal Kepolisian Periode Tahun 2001-2005

Kejahatan	2001	2002	2003	2004	2005
Curat	51118	44659	43307	25009	27982
Curanmor	29403	26016	22275	15716	15985
Penipuan	12027	14429	18318	6626	14335
Aniring	9464	9143	11714		
Anirat	11590	11229	11229	13136	12104
Penggelapan	8702	9806	11227	5815	11068
Curas	11242	9427	8257	6108	5716
Narkotika	5540	6624	7434	2250	3123
Curing	2046	1900	2011		
Perkosaan	1300	1549	1900	1659	2689
Pembunuhan	2163	1687	1635	1426	1665

Sumber: Mabes Polri, 2006

Dari tabel data 3 terlihat bahwa data pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor mendominasi kasus kejahatan dari tahun 2001-2005. Kejahatan selalu berada di setiap ruang kehidupan masyarakat, dari lingkup keluarga sampai dengan negara. Di wilayah keluarga, kejahatan yang biasanya terjadi mulai dari pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan sampai dengan kejahatan seksual dan bentuk kejahatan lainnya memberikan rasa tidak aman bagi individu yang berada di dalam suatu keluarga. Di jalanan atau tempat umum kejahatan juga dapat terjadi seperti pencurian, pencopetan, perampokan, pembegalan, sampai dengan kasus pembunuhan. Kejahatan tidak dapat dibatasi oleh ruang, karena kejahatan dapat kapan saja terjadi.

Kejahatan berkaitan dengan salah satu variabel demografi yang akan mempengaruhi komposisi penduduk, yakni variabel mortalitas, atau angka kematian. Sumbangan variabel kejahatan terhadap mortalitas merupakan suatu kajian yang menarik untuk diamati. Variabel kejahatan yang dimaksud adalah resiko untuk menjadi korban kejahatan. Penelitian yang berusaha mengkaitkan antara variabel-variabel sosiodemografis terhadap resiko untuk menjadi korban kejahatan merupakan tema penelitian yang baru dilakukan di Indonesia.

1.2. Permasalahan Penelitian

Rasa aman terbebas dari perasaan cemas dan khawatir untuk menjadi korban kejahatan merupakan faktor penting bagi individu untuk dapat mengaktualisasikan dirinya dalam kegiatan sehari-hari, berkaitan dengan pekerjaannya maupun secara lebih luas dalam konteks aktivitas individu dalam program pembangunan nasional. Rasa aman menjadi faktor yang mutlak diperlukan oleh individu untuk terbebas dari segala bentuk macam kekerasan, termasuk kejahatan di dalamnya. Menurut Amartya Sen sebagaimana dikutip Dreeze dan Khera, terbebas dari kekerasan merupakan salah satu aspek penting dalam peningkatan kualitas hidup, yang sering diabaikan dalam isu-isu kajian pembangunan. Banyak individu yang menginginkan terhindar dari perlukaan, penyiksaan dan penganiayaan, dan hidup akan menjadi lebih baik tanpa pengalaman traumatik tersebut. Perlindungan dari bentuk-bentuk kekerasan dapat dijadikan salah satu 'kemampuan' yang dapat mempengaruhi terhadap kualitas kehidupan (Dreeze & Kheera

: 2000).Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh individu dapat berasal dari kebijakan negara. Sen mengambil contoh kasus di China tentang kebijakan keluarga berencana yang bersifat koersif, termasuk kebijakan *one-child family*. Dampak sosial dari kebijakan ini mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh negara, meningkatnya kasus aborsi, dan angka kematian bayi perempuan yang tinggi (Sen : 1999). Jadi rasa aman terbebas dari kejahatan apapun memiliki peranan yang signifikan dalam menentukan kualitas kehidupan manusia, selain faktor pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengkaji hubungan antara variabel demografis dengan risiko seseorang menjadi korban kejahatan. Variabel demografis yang diukur antara lain adalah variabel usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pengeluaran, ras, kegiatan utama bekerja dan status perkawinan, Variabel ini dipilih untuk menggambarkan keterkaitan antara variabel demografis dengan resiko menjadi korban kejahatan.

Korban kejahatan sangat menarik untuk dikaji karena sangat berkaitan dengan karakteristik variabel demografis, salah satunya adalah dengan angka mortalitas. Angka mortalitas tidak melulu disebabkan oleh kematian ibu dan anak, penyakit, ataupun kelaparan akan tetapi kejahatan juga memiliki sumbangan yang signifikan dalam menyumbangkan angka mortalitas. Dalam tesis ini akan dianalisis variabel sosio demografis apa saja yang menyebabkan munculnya risiko seseorang mengalami viktimisasi

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut , penelitian ini ingin mengetahui :

1. Seberapa besarkah peluang individu untuk mengalami viktimisasi kejahatan di Indonesia ?
2. Faktor – faktor sosiodemografis apa saja dari karakteristik individu yang berpengaruh terhadap risiko seorang individu mengalami risiko terviktimisasi kejahatan di Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang mempengaruhi resiko individu untuk menjadi korban kejahatan atau memiliki pengalaman tervektimisasi.

1.4.2 Tujuan Khusus

- Untuk mengidentifikasi pengaruh karakteristik sosiodemografis individu (jenis kelamin, tingkat pendidikan, lokasi tempat tinggal, tingkat pendapatan, kegiatan utama bekerja, status pernikahan dan usia) terhadap resiko individu untuk menjadi korban kejahatan atau memiliki pengalaman tervektimisasi.
- Untuk mengidentifikasi tentang pentingnya rasa aman dari segala bentuk kejahatan dalam pengukuran *Human Development Index* sebagai indikator dalam peningkatan kualitas hidup dalam berpartisipasi dalam pembangunan.
- Untuk memberikan saran-saran kebijakan-kebijakan publik dalam bidang pencegahan kejahatan berdasarkan analisis karakteristik korban kejahatan.

1.5. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko mengalami kejahatan pada individu dalam konteks masyarakat Indonesia. Selain itu pula diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan kajian sosiologi kependudukan di Indonesia. Kemudian secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu saran bagi para *stakeholders* dalam pencegahan kejahatan berdasarkan analisis karakteristik korban kejahatan sehingga dapat menghasilkan kebijakan publik yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian yakni bagian pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bagian dua berisikan tentang kajian kepustakaan dan teori yang berkaitan dengan variabel sosiodemografis dengan pengalaman viktimisasi kejahatan. Bagian tiga berisi tentang metodologi penelitian yang memuat tentang metode penelitian, definisi operasional, hipotesis, model analisis keterbatasan penelitian dan uji statistik yang dipergunakan. Bagian empat berisi tentang temuan dan analisis data, yakni analisis deskriptif meliputi tabulasi silang, tabel deskriptif dan analisis inferensial dengan menggunakan uji regresi logistik dengan *model dummy*. Bagian lima adalah penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.